

# Peran FIFA Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Dualisme PSSI di Indonesia Pada Tahun 2011-2013

I Putu Wintara Wima Putra<sup>1)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [wintarawima@gmail.com](mailto:wintarawima@gmail.com)<sup>1</sup>, [rainypriadarsini@yahoo.com](mailto:rainypriadarsini@yahoo.com)<sup>2</sup>, [kawitriresen@gmail.com](mailto:kawitriresen@gmail.com)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*Football, which is the most popular sport in the world, has the highest authority organization named FIFA. FIFA has the authority to make every rules and regulations about football that must be obeyed by every members of FIFA. FIFA consist of every main football organizations all over the world, including Indonesia which has a main football organization called PSSI. In Indonesia, football is also one of the most popular sport among public, Indonesia also known as a country with huge fanaticism supporters. Having massive fans now made football a promising business. On the other side, with too many interested parties made this business susceptible of conflicts among those interested parties. In Indonesia for example, the issue about football was starting when FIFA thought that at Nurdin Halid leadership era PSSI lose its credibility and then there were also the time when dualism in PSSI occurred where there were two leaders inside PSSI, one led by Djohar Arifin and the other led by La Nyalla Mattalitti under the name of KPSI. This duality problem occurred because of the difference of opinion about Indonesia's main league. This chaos made FIFA went directly to resolve the conflict in PSSI. As International organization, FIFA can do its role and function well, so that through a long process FIFA can reunite PSSI.*

**Keyword : FIFA's Role, Football. International Organization, PSSI Dualism.**

## 1. PENDAHULUAN

Sepak bola menjadi sebuah permainan yang sarat akan kepentingan politik, hal ini dikarenakan sepak bola adalah permainan yang sangat digemari di seluruh dunia. Banyaknya penggemar dan besarnya sifat fanatisme dalam setiap pertandingan tim yang dibela membuat sepak bola sudah merasuk ke bidang ekonomi, politik, sosial, dan kesejahteraan umum (Pandjaitan, 2011: 7). Begitu pula yang terjadi di Indonesia, di dalam tubuh PSSI tersebut terjadi sebuah konflik yang sarat akan kepentingan politik, bisnis dan kekuasaan yang sangat merugikan

serta berpengaruh terhadap terpuruknya prestasi sepak bola timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 191 dunia. Berdasarkan data yang dikutip dari *FIFA/Coca-Cola World Ranking* (2016), peringkat ini merupakan yang terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia.

Kekisruhan yang terjadi di tubuh PSSI diawali dengan hilangnya kredibilitas Nurdin Halid, sebagai ketua umum PSSI terkait kasus tindak pidana korupsi. Beberapa waktu kemudian, muncul suatu konflik dualisme yang terjadi dalam tubuh PSSI tidak lama setelah Djohar Arifin terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2011-2015

menggantikan ketua umum terdahulu yaitu Nurdin Halid. Keputusan kontroversial Djohar dalam perubahan struktur liga Indonesia dengan menyatakan bahwa *Liga Super Indonesia* (LSI) merupakan liga yang illegal. Selanjutnya, Djohar Arifin menyatakan bahwa kompetisi sepakbola yang resmi adalah *Liga Primer Indonesia* (LPI). Keputusan pergantian dari *Liga Super Indonesia* (LSI) menjadi *Liga Primer Indonesia* (LPI) tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian anggota PSSI, yang selanjutnya tetap menggulirkan LSI secara sepihak. Konflik yang terus berkembang menyebabkan lahirnya *Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia* (KPSI) yang beranggotakan mantan anggota PSSI yang dipecat Djohar. Selanjutnya, KPSI melakukan *Kongres Luar Biasa* (KLB) dan menunjuk La Nyalla Mattalitti sebagai ketua umum versi mereka. Hal ini membuat PSSI terpecah menjadi dua kubu antara PSSI yang diketuai Djohar dengan kubu KPSI yang diketuai La Nyalla (Goal, 2013).

Adanya dualisme kepengurusan PSSI membuat FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia mengambil sikap. *Federation International de football association* (FIFA) adalah badan pengatur sepak bola dunia yang memiliki tujuan yakni "*building a better future for all through football*" (FIFA, 2016), Sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, FIFA memiliki wewenang untuk mengatur seluruh kegiatan resmi

persepakbolaan dunia. FIFA juga sering mengambil peran aktif dalam menjalankan dan mengembangkan permainan sepak bola serta konflik maupun permasalahan yang terjadi di suatu negara terkait sepak bola.

Terkait permasalahan di Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kemenpora mendukung keputusan FIFA dan menyatakan siap untuk memfasilitasi Komite Normalisasi bentukan FIFA (Kompas, 2011). Pemerintah juga ikut mengambil sikap untuk membantu memediasi antara PSSI dan KPSI. Agung Laksono sebagai pelaksana tugas Menpora mengatakan bahwa akan berupaya untuk membantu menyelesaikan isu dualisme PSSI untuk menghindari sanksi FIFA. Namun, dengan tetap berkonsultasi dengan FIFA. Menurut Agung (2012), Pemerintah Indonesia tidak ingin melanggar Statuta FIFA yang menyatakan bahwa tidak mengizinkan pihak ketiga mengintervensi asosiasi sepakbola tanpa sepengetahuan FIFA (JPNN, 2012). Menpora juga menambahkan bahwa jika pelaksanaan Kongres dan MoU gagal, maka keabsahan dan hasil kongres akan diserahkan kepada FIFA.

Beberapa kali ultimatum yang diberikan FIFA kepada PSSI untuk mengakhiri masalah dualisme tersebut tidak pernah berhasil. Sehingga, FIFA mengambil keputusan untuk turun tangan dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di dalam PSSI ini. Dengan otoritas yang dimiliki oleh FIFA

sebagai *Hybrid International Organization* maka FIFA dapat turun langsung untuk membantu menyelesaikan konflik dualisme PSSI. Maka dari itu, peran FIFA dalam upaya penyelesaian konflik PSSI sangat penting adanya.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **The Power of FIFA Over National Governments: A New Actor in World Politic ?**

Borja Garcia (2014) mengatakan bahwa bagaimana saat ini FIFA muncul sebagai sebuah aktor baru dalam politik global. Sebuah lembaga non – pemerintah yang mengatur persepakbolaan seluruh dunia. FIFA sangat tidak ingin ada pihak ketiga ikut campur dalam persepakbolaan baik itu dalam sebuah badan sepakbola negara maupun dalam badan FIFA sendiri. FIFA sangat tidak ingin adanya gangguan politik dan menjaga otonomi sepakbolanya.

Garcia (2014) menyatakan bahwa sebagai satu-satunya lembaga tertinggi persepakbolaan dunia, FIFA memiliki otoritas dalam berbagai peraturan terutama adanya intervensi ke dalam sepakbola. Hal ini yang terkadang menjadi kontroversi dan menimbulkan gesekan antara FIFA dan suatu negara dalam upaya penyelesaian konflik terkait isu – isu persepakbolaan di negara tersebut. Power FIFA sendiri yakni tidak mengizinkan pemerintah atau pihak manapun yang berusaha untuk mengintervensi sepakbola. Jika hal itu terjadi maka FIFA dapat

mengambil alih atau membekukan sebuah asosiasi sepakbola sebuah negara yang bermasalah tersebut, memberi peringatan hingga mencoret keanggotaan asosiasi tersebut.

Tulisan Garcia (2014) ini membantu peneliti dalam memberikan gambaran mengenai kewenangan FIFA sebagai aktor, bagaimana power yang dimiliki dan bagaimana FIFA berperan dalam isu – isu terkait sepakbola di beberapa negara. Namun, dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisa bagaimana peran FIFA dalam isu dualisme PSSI melalui perspektif hubungan internasional dengan konsep organisasi internasional.

### **Peran International Committee of Red Cross (ICRC) Dalam Mengatasi Masalah Kemanusiaan di Aceh Tahun 2004 – 2006**

Rafika (2015) menjelaskan bagaimana ICRC merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak untuk mengatasi masalah kemanusiaan yang terjadi dalam situasi konflik bersenjata dan saat terjadinya bencana alam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rafika (2015) ICRC berperan terhadap dua isu yang terjadi yakni peran membantu korban tsunami Aceh serta mengatasi masalah GAM.

Penelitian ini sangat membantu peneliti melihat gambaran dalam peran yang dilakukan ICRC sebagai sebuah organisasi internasional berperan dalam isu yang terjadi di Indonesia.

Sebagai Organisasi Internasional yang bersifat hybrid, peran yang dilakukan ICRC sangat signifikan dengan berbagai tindakan riil seperti dapat bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, pihak berwenang serta PMI dengan memberikan bantuan untuk bencana alam tsunami Aceh serta memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban konflik GAM. Dalam tulisan Rafika (2015) ini, peneliti juga dapat melihat bagaimana ICRC dapat masuk ke dalam sebuah negara dan menjalankan perannya sebagai aktor independen dalam memediasi antara pihak yang berkonflik yakni Indonesia dengan GAM.

#### **Konsep Organisasi Intrnasional**

Clive Archer (2001) dalam bukunya yang berjudul *International Organizations : Third Edition* mengatakan bahwa : organisasi internasional merupakan struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggota yang melibatkan dua atau lebih negara – negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama.

Menurut Willets (2011), hybrid NGOs merupakan organisasi internasional yang termasuk dalam keanggotaannya, yang diwakili oleh departemen pemerintah dan atau lembaga pemerintah lainnya, serta aktor transnasional, yang mungkin dari satu negara dan atau multi-negara. Willets (2011) juga menambahkan

bahwa *Hybrid International Organizations* memiliki sifat *decision-making authority* dimana seluruh anggota suka tidak suka wajib mematuhi keputusan yang telah dibuat.

Archer (2001) mengidentifikasi peran penting organisasi internasional menjadi tiga, yaitu :

1. Sebagai Instrumen  
sebagai instrumen, organisasi internasional dapat menjadi alat atau sarana oleh negara – negara anggota untuk mencapai kepentingan atau tujuan politiknya.
2. Sebagai Arena  
Organisasi internasional, baik IGO maupun NGO, merupakan tempat bertemunya para anggota untuk membahas permasalahan yang ada.
3. Sebagai Aktor Independen  
Organisasi internasional dapat membuat keputusan – keputusan sendiri tanpa adanya intervensi dari luar organisasi. Dengan menjadi independen dan tanpa intervensi pihak luar, diharapkan organisasi internasional dapat menjadi netral dalam pengambilan keputusan terkait isu yang ada, baik di antar anggota maupun di dalam internal anggota. Peran inilah yang kemudian berelasi kuat dengan fungsi – fungsi yang akan dijalankan oleh organisasi internasional.

Adapun Archer (2001) dalam bukunya menyebutkan fungsi – fungsi organisasi internasional, yakni :

1. Artikulasi dan Agregasi

Organisasi internasional sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingannya. Namun, dalam NGO yang anggotanya tidak selalu aktor negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting saat ini yaitu sebagai badan artikulasi dan agregasi dalam sebuah isu dan mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.

2. Menghasilkan Norma

Organisasi internasional memiliki fungsi untuk menetapkan nilai – nilai normatif seperti prinsip – prinsip non-diskriminasi sebagai kontribusinya dalam sistem politik internasional.

3. Rekrutmen

Organisasi internasional memiliki fungsi penting untuk merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

Organisasi internasional dalam hal ini berfungsi untuk mensosialisasikan nilai – nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi yang dilakukan yakni melalui level nasional yang dapat efektif mempengaruhi individu – individu atau kelompok-kelompok suatu negara yang aktif dalam lingkungan internasional maupun wakil mereka dalam

organisasi. Sehingga, organisasi internasional memiliki andil dalam penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

5. *Rule making*

Pembuatan peraturan – peraturan internasional biasanya didasarkan melalui organisasi internasional yang beranggotakan negara – negara di dunia. Hal ini disebabkan oleh sistem internasional yang tidak memiliki pemerintahan dunia.

6. *Rule application*

Pelaksanaan peraturan – peraturan internasional hampir seutuhnya adalah hak kedaulatan negara tersebut. Karena hal tersebut, fungsi pelaksanaan peraturan oleh organisasi internasional tersebut biasanya lebih menjadi terbatas pada pengawasan pelaksanaan saja.

7. *Rule adjudication*

Dalam hal ini organisasi internasional memiliki fungsi untuk mengesahkan peraturan – peraturan dalam sistem internasional. Fungsi adjudikasi tersebut dilakukan oleh lembaga kehakiman, namun lembaga kehakiman yang tidak memadai dan tidak ada sifat memaksa menyebabkan hanya akan terlihat jika ada pihak – pihak yang bertikai.

8. Tempat untuk memperoleh informasi

Organisasi memiliki fungsi untuk mencari informasi, mengumpulkan informasi, mengolah serta

menyebarkan informasi tersebut. Sehingga organisasi internasional merupakan sumber informasi dari negara – negara anggota.

9. Operasionalisasi

Organisasi internasional memiliki fungsi seperti pelayanan teknis, bantuan kemanusiaan, dll. Seperti halnya pemerintahan. fungsi ini dapat dilihat bagaimana organisasi internasional seperti perlindungan pengungsi oleh UNHCR, bantuan keuangan dari World Bank, dan perlindungan terhadap anak – anak oleh UNICEF.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan bagaimana FIFA berperan dalam upaya penyelesaian konflik dualisme PSSI.

#### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data diperoleh dari referensi dan bahan bacaan yang relevan dengan penelitian baik melalui jurnal, buku akademik, website resmi yang megacu pada informasi mengenai bagaimana FIFA berperan dalam upaya penyelesaian konflik dualisme PSSI.

#### Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Non Governmental Organization, dengan melihat bagaimana FIFA berperan dalam

upaya penyelesaian konflik dualisme PSSI.

#### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan penelusuran online. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian dan penelusuran online yang berkaitan dengan bagaimana FIFA berperan dalam upaya penyelesaian konflik dualisme PSSI.

#### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisa dari data-data yang diperoleh menjadi suatu intepretasi yang lebih mudah untuk dipahami.

#### Teknik Penyajian Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk naratif dengan proses penentuan tema dan topik bahasan yang dibahas di masing-masing bab.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### FIFA sebagai Hybrid International Organizations

Menurut Willets (2011), FIFA sebuah organisasi internasional yang yang berbentuk *Hybrid International Organizations*, merupakan organisasi internasional yang termasuk dalam keanggotaannya, yang diwakili oleh departemen pemerintah dan atau

lembaga pemerintah lainnya, serta aktor transnasional, yang mungkin dari satu negara dan atau multi-negara. dalam keanggotaannya FIFA memiliki asosiasi-asosiasi sepakbola tiap negara sebagai anggota.

Willems menambahkan, FIFA yang bersifat *Hybrid* memiliki otoritas pengaturan penuh sepakbola dan memiliki *decision-making authority* (2011: 125).

Garcia (2014) mengatakan, FIFA mendapatkan *power* melalui beberapa hal yakni sebagai satu-satunya lembaga sepakbola di dunia, maka FIFA dapat memonopoli sepakbola dengan membuat segala peraturan sepakbola dan menyelenggarakan piala dunia. Adapun juga menurut Garcia, FIFA memperoleh *power* dengan memanfaatkan *global popularity of football* dimana sepakbola yang merupakan olahraga yang digemari dunia serta bergabungnya asosiasi-asosiasi sepakbola negara membuat FIFA secara langsung akan mendapat legitimasi sebagai otoritas sepakbola dunia.

#### **FIFA Dalam Isu Sepakbola**

FIFA memiliki Statuta FIFA sebagai pedoman dalam mengelola sepakbola. FIFA menggunakan Statuta FIFA untuk menjaga kedaulatan, otonomi dan kewenangannya terhadap adanya intervensi dari pihak ketiga. Dalam setiap isu sepakbola, FIFA tetap berpedoman pada Statuta FIFA untuk menyelesaikan permasalahan yang

terjadi. Dalam hal ini, posisi FIFA lebih dominan karena mampu membekukan asosiasi sepakbola negara serta melarang aktivitas sepakbola sebuah negara tersebut di seluruh dunia. (Pandjaitan, 2011: 307)

Dalam isu sepakbola di Indonesia, FIFA mengambil sikap terkait kekisruhan dualisme kepengurusan PSSI. Ultimatum yang diberikan FIFA kepada PSSI untuk mengakhiri masalah dualisme tersebut tidak pernah berhasil. Sehingga, FIFA mengambil keputusan untuk turun tangan dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Dengan otoritas yang dimiliki, maka FIFA dapat turun langsung untuk membantu menyelesaikan isu yang ada di dalam sepakbola Indonesia.

#### **Peran FIFA Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Dualisme PSSI**

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan sebuah peran yang dikutip dari pengertian peran organisasi internasional oleh Clive Archer (2011) yakni sebagai aktor independen, FIFA memiliki beberapa fungsi yang dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Serta sebagai aktor independen, FIFA dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa adanya intervensi dari luar organisasi.

Sebagai aktor independen, adapun fungsi yang dijalankan oleh FIFA yakni fungsi artikulasi dan agregasi, norma, penerapan keputusan dimana dalam fungsi ini FIFA memberikan saran atau

solusi sesuai dengan norma dan peraturan FIFA untuk menyelesaikan permasalahan seperti surat tugas kepada PSSI perihal unifikasi liga dan surat tugas kepada Kemenpora untuk memediasi antara PSSI dan KPSI. Selanjutnya, fungsi operasionalisasi FIFA selalu memonitor perkembangan isu yang terjadi serta mengawasi setiap Kongres yang dilaksanakan oleh PSSI.

Dalam subbab kali ini, akan dijelaskan mengenai bagaimana peran FIFA dalam upaya penyelesaian konflik dualisme PSSI.

#### **Membentuk Komite Normalisasi**

FIFA mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan keputusan untuk mengambil alih PSSI karena menganggap PSSI dibawah Nurdin Halid sudah gagal. PSSI dianggap sudah tidak dapat mengendalikan persepakbolaan Indonesia. Dengan catatan, adanya laga LPI yang berada diluar kendali PSSI serta tidak mampu menggelar kongres petapan tata tertib pemilihan atau *electoral code* dan memilih komite pemilihan. Hal ini membuat FIFA berkesimpulan bahwa PSSI telah kehilangan kredibilitasnya dan tidak dalam posisi untuk menyelesaikan krisis yang terjadi saat ini. Selanjutnya FIFA memutuskan untuk membentuk Komite Normalisasi yang akan mengambil alih seluruh tugas Komite Eksekutif PSSI di bawah pimpinan Nurdin Halid (Viva, 2011).

Menggunakan Statuta FIFA, pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "*Executive bodies of Member Associations may*

*under exceptional circumstances be removed from office by the Executive Committee in consultation with the relevant Confederation and replaced by a normalisation committee for a specific period of time.*" Melalui keputusan tersebut, FIFA membuktikan diri sebagai aktor independen dengan mengganti PSSI dengan Komite Normalisasi tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Keputusan ini merupakan kebijakan FIFA sesuai dengan Statuta FIFA. (Liputan6, 2011)

Respon yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Komite Normalisasi sangat positif. Melalui kemenpora Andi Mallarangeng, pihaknya menyatakan bahwa siap untuk mendukung serta memfasilitasi Komite Normalisasi selama bertugas di Indonesia. sebagai contoh, Komite Normalisasi diizinkan untuk menggunakan kantor PSSI untuk bekerja, serta Kemenpora siap memberikan fasilitas-fasilitas lainnya untuk mendukung kinerja Komite Normalisasi.

Kemenpora juga menyatakan bahwa pembentukan Komite Normalisasi merupakan suatu momentum untuk reformasi persepakbolaan Indonesia serta reformasi untuk PSSI juga dalam mengelola sepakbola Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora menyatakan bahwa keputusan FIFA sejalan dengan Pemerintah Indonesia. (Kompas, 2011)



Pada tanggal 20 Mei 2011, Komite Normalisasi melakukan kongres yang dipimpin oleh Agum Gumelar. Dalam kongres ini, FIFA mengawasi secara langsung dengan diwakili oleh Direktur FIFA Henry Regenass. Namun kongres tersebut dianggap gagal karena terjadinya keributan dan tidak dapat memutuskan keputusan apapun. Hal ini membuat

Komite Normalisasi selanjutnya mengadakan kongres selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2011. FIFA kembali mengingatkan penekanan terhadap keempat calon sebelumnya. Jika syarat – syarat tersebut tidak dapat dituntaskan serta terjadi keributan ataupun deadlock maka tidak segan – segan FIFA akan bertindak tegas membekukan PSSI pada tanggal 1 Juli 2011.

Kongres yang dihadiri utusan FIFA dan perwakilan AFC serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dan Rita Subowo sebagai ketua KONI menghasilkan keputusan yang sangat penting. Hasil dari kongres ini menetapkan Djohar Arifin Husein sebagai Ketua Umum PSSI periode 2011 – 2015. Tentu saja hasil kongres ini sangat memuaskan karena Komite Normalisasi dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan agenda FIFA dan PSSI terhindar dari sanksi FIFA. (Kompas, 2011)

### **Surat FIFA untuk Unifikasi Liga**

Pada tanggal 25 Oktober 2011, secara resmi PSSI mencabut kewenangan PT Liga Indonesia. Namun, adanya perbedaan pendapat mengenai Liga yang resmi membuat PSSI menjadi terpecah menjadi dua kubu, yakni PSSI dan sebuah grup yang menamai dirinya sebagai Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia atau KPSI. Dimana PSSI dengan liga resminya yakni Liga Primer Indonesia dan KPSI dengan liga resminya yakni Liga Super Indonesia.

Adanya Dualisme ini membuat FIFA tidak tinggal diam. Pada tanggal 22 Desember 2011, FIFA memberikan solusi kepada PSSI melalui surat resmi yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal FIFA, Jerome Valcke. Adapun isi surat resmi FIFA yang dikutip dari Kompas (2011) sebagai berikut :

1. Statuta FIFA Pasal 18 butir satu menulis bahwa “Liga atau grup sepakbola lainnya yang berafiliasi sebagai anggota FIFA harus tunduk dan diakui sebagai anggota”. ISL bukanlah anggota PSSI dan juga tidak dikenal oleh PSSI. Klub yang bermain di ISL oleh tindakannya akan mengancam kapasitas PSSI untuk melaksanakan Statuta FIFA. Dengan demikian, ini merupakan sesuatu yang esensial bahwa PSSI akan mengambil suatu tindakan

yang layak agar klub – klub ISL kembali di bawah Kontrol PSSI. Apabila klub – klub tersebut tidak patuh akan segera dikenai sanksi.

2. Permintaan tegas dari FIFA bahwa tidak diperkenankan perangkat pertandingan PSSI, terutama wasit, untuk ikut serta dalam kegiatan ISL. bagi mereka yang melanggar akan diberikan sanksi.
3. Pemain yang bermain di liga ISL tidak bisa ditransfer untuk bermain ke luar negeri. TMS (*Transfer Matching System*) mereka akan dicabut. PSSI diminta untuk menyampaikan kepada FIFA daftar nama klub – klub yang ikut ISL.
4. Pemain – pemain ISL juga tidak diperkenankan bermain di timnas.
5. Apabila sampai 20 Maret situasi kekisruhan ini tidak juga berakhir, maka persoalan PSSI akan dilaporkan kepada Komite Asosiasi FIFA dan sanksi akan dikenakan kepada Indonesia.

Adapun laporan-laporan mengenai ketidaksesuaian standar klub, ketidakberesan manajemen liga serta adanya dualisme dalam PSSI membuat

FIFA menjalankan fungsinya sebagai agregasi dan artikulasi yakni mengartikulasi laporan-laporan tersebut dan memberikan solusi terkait isu yang ada. Dalam hal ini, FIFA melalui Jerome Valcke selaku Sekretaris Jenderal FIFA mengagregasi laporan tersebut untuk mendapatkan sebuah solusi sesuai dengan norma dan peraturan FIFA. Melalui surat resmi ini, FIFA menerapkan peraturannya kepada PSSI terkait isu yang ada di dalam persepakbolaan Indonesia.

#### **FIFA Tidak Mengakui KPSI**

Pada tanggal 30 Desember 2011, FIFA sebagai lembaga tertinggi sepakbola dunia menyatakan tidak mengakui KPSI (Goal, 2011). Dengan pernyataan tersebut dapat dilihat bagaimana FIFA menggunakan otoritasnya sebagai organisasi internasional yang memiliki *decision-making authority* dengan menyatakan untuk tidak mengakui badan sepakbola selain PSSI sesuai dengan Statuta FIFA Pasal 10 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa FIFA hanya mengakui satu asosiasi sepakbola di Indonesia yakni PSSI.

Merujuk kepada surat resmi Jerome Valcke sebelumnya, bahwa FIFA juga tidak mengakui liga ISL yang dilaksanakan oleh KPSI serta melarang seluruh perangkat resmi pertandingan yakni wasit dan official yang berada di bawah FIFA untuk memimpin pertandingan ISL FIFA juga mem-*banned* seluruh tim ISL di dalam semua

kegiatan resmi FIFA, baik kompetisi maupun transfer pemain. Hal tersebut ditegaskan FIFA melalui pernyataan James Johnson selaku Manager Member Association FIFA yaitu *"FIFA berkonsentrasi untuk memastikan di seluruh negara anggota bahwa hanya ada satu kompetisi tertinggi"*. (Gatra, 2013)

#### **Membentuk Task Force**

Pada 4 April 2012, FIFA membentuk *Task Force* yang terdiri dari Wakil Presiden AFC Prince Abdullah Ibnu Sultan Ahmad Shah, anggota Komite Eksekutif AFC Dato Worawi Makudi, Sekjen AFC Alex Soosay, dan Ketua Asosiasi Anggota dan Hubungan Internasional James Johnson. Pembentukan tim *Task Force* ini merupakan peran FIFA selanjutnya sebagai aktor independen untuk membantu menyelesaikan permasalahan PSSI..

Pada tanggal 7 Juni 2012 tim *Task Force* mengadakan pertemuan dengan PSSI dan KPSI di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan antara PSSI dan KPSI untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di persepakbolaan Indonesia. Bentuk kesepakatan tersebut berupa nota kesepahaman Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani oleh wakil PSSI, KPSI serta diketahui oleh FIFA dan AFC.

Pada tanggal 4 Oktober 2012, PSSI mengirim surat kepada FIFA dengan tujuan untuk meminta saran

mengenai adanya pelanggaran MoU oleh KPSI. Indonesia terancam sanksi FIFA pada akhir tahun 2012 dilihat dari laporan Joint Committee terkait kegagalan MoU, Demi menghindari sanksi FIFA tersebut Pemerintah melalui Kemenpora membentuk gugus tugas atau *Task Force* untuk menghindari Indonesia dari kemungkinan sanksi FIFA pada Desember 2012. Hal ini merupakan sebuah respon dari pemerintah Indonesia melalui Kemenpora untuk menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA. *Task Force* yang diketuai oleh Rita Subowo ini memiliki tiga tugas penting yakni :

1. Berkonsultasi dengan FIFA dalam upaya untuk menghindari dijatuhkannya sanksi kepada Indonesia.
2. Berkonsultasi dengan FIFA dan AFC mengenai kemungkinan pemerintah menggunakan kewenangannya sesuai UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan PP Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
3. Melakukan langkah-langkah terhadap organisasi dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi

apabila Indonesia diberi sanksi oleh FIFA.

Nasib baik masih dialami Indonesia setelah pada 14 Desember 2012, FIFA mengatakan bahwa akan kembali memberikan kesempatan kepada PSSI untuk menuntaskan konflik dualisme di Indonesia. FIFA memberikan deadline hingga Maret 2013. Hal tersebut merupakan batas waktu terakhir, jika tidak maka FIFA tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada Indonesia.

#### **Bekerjasama Dengan Kemenpora**

Melihat konflik dualisme yang tidak kunjung selesai membuat FIFA melanggar Statuta sendiri yakni dengan meminta Pemerintah Indonesia untuk membantu melakukan mediasi terkait permasalahan tersebut demi nasib sepakbola Indonesia dan terhindar dari sanksi FIFA. FIFA beralasan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora untuk campur tangan karena menurut FIFA, Pemerintah Indonesia lebih tahu dengan kondisi di Indonesia serta FIFA sudah tidak percaya lagi dengan pengurus PSSI dan KPSI. Dalam hal ini FIFA kembali melakukan perannya sebagai aktor independen bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui kemenpora untuk menyelesaikan dualisme PSSI.

Saat bekerjasama dengan kemenpora, FIFA juga melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi dengan

memberikan solusi terkait penyelesaian dualisme PSSI. Dalam surat tersebut, FIFA memberikan solusi kepada Kemenpora terkait upaya untuk menyelesaikan konflik dualisme PSSI. Dilansir dari halaman *kemenpora.go.id* (2013), FIFA mengirim surat kepada Kemenpora tertanggal 13 Februari 2013. Adapun isi surat tugas FIFA yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal FIFA, Jerome Valcke kepada Kemenpora tersebut yakni :

1. Dilakukan unifikasi liga.
2. Perubahan statuta.
3. Pengembalian empat exco tanpa syarat.
4. Menyelenggarakan Kongres dengan memverifikasi voters Kongres Solo Juli 2011.

Melihat lampu hijau dari FIFA, pada tanggal 18 Februari 2012, Roy Suryo didampingi ketua KOI, yakni Rita Subowo mengumumkan bahwa PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa pada tanggal 17 Maret 2013 sesuai dengan hasil MoU Kuala Lumpur tahun lalu.

Akhirnya pada tanggal 17 Maret 2013, PSSI dan KPSI yang dimediasi oleh Kemenpora menggelar Kongres Luar Biasa di Jakarta. Kongres ini tetap diawasi oleh FIFA yang diwakili oleh Manajer Departemen Asosiasi FIFA yaitu Marco Leal, Ketua Federasi Sepak Bola Belanda yaitu Michael van Praag serta James Kitching selaku Ketua Sports Legal Service,

Diciplinary, and Governance AFC (Viva, 2013).

Kongres Luar Biasa PSSI ini juga menghasilkan keputusan – keputusan penting yakni :

1. Memberikan sanksi skorsing pada enam anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Farid Rahman, Tuti Dau, Bob Hippy, Sihar Sitorus, Mawardi Nurdin, dan Widodo Santoso, yang melakukan *walk out*. Keenam anggota Komite Eksekutif itu akan ditentukan nasibnya pada Kongres PSSI mendatang.
2. Mengangkat empat anggota Komite Eksekutif yang baru, yakni La Siya, Zul Fadli, Hardi Hasan, dan Djamal Azis. Kehadiran mereka melengkapi anggota Komite Eksekutif PSSI sehingga keseluruhannya berjumlah 15 orang.
3. Mengangkat La Nyalla Mattalitti menjadi Wakil Ketua Umum PSSI mendampingi Djohar Arifin, menggantikan Farid Rahman yang terkena skorsing.
4. Membubarkan secara resmi Komite Penyelamat Sepakbola Seluruh Indonesia (KPSI).

Kongres Luar Biasa berjalan dengan baik. Melalui Kongres tersebut, adanya penandatanganan kesepakatan antara Djohar Arifin Husein selaku Ketua Umum PSSI dan La Nyalla Mattalitti selaku Ketua Umum KPSI menandakan bubarnya KPSI.

Kabar baik untuk PSSI dan Indonesia dalam Rapat Komite Eksekutif FIFA. FIFA menerima hasil Kongres Luar Biasa sehingga Indonesia terhindar dari sanksi FIFA (Goal, 2013).

## 5. KESIMPULAN

Dalam isu sepakbola yang terjadi di Indonesia, pemerintah dan FIFA telah mengetahui permasalahan yang terjadi. Namun, pemerintah tidak mau melanggar peraturan FIFA sehingga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah melalui kemenpora selalu berkonsultasi kepada FIFA terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia juga selalu merespon positif serta kooperatif terkait keputusan yang dibuat oleh FIFA terkait PSSI. FIFA juga berpendapat bahwa isu yang terjadi berhubungan dengan negara, sehingga hal tersebut yang menjadi acuan bagi FIFA mengakomodir peran pemerintah dalam upaya untuk membantu menyelesaikan isu dualisme PSSI. Akan tetapi, pemerintah harus tetap berkoordinasi dengan FIFA disetiap langkah yang diambil. Jika tidak, maka FIFA akan memberi sanksi seperti yang dilakukan FIFA terhadap beberapa negara lain.

Berperan sebagai aktor independen bersifat *hybrid*, FIFA memiliki otoritas penuh terhadap keputusan yang diambil. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana FIFA memutuskan untuk mengambil alih PSSI, membentuk Komite Normalisasi, membentuk Task Force, hingga bekerjasama dengan kemenpora untuk membenahi kekisruhan yang terjadi serta mengawasi setiap Kongres yang diselenggarakan PSSI. Semua keputusan FIFA tersebut sudah sesuai dengan norma dan peraturan yang dimiliki FIFA. Di dalam setiap keputusan yang dihasilkan, FIFA selalu bersifat independen dan berpedoman dengan Statuta yang dimiliki.

FIFA telah menjalankan perannya dan fungsinya dalam upaya membantu menyelesaikan konflik dualisme PSSI di Indonesia. FIFA juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora untuk membantu memediasi kedua belah pihak. Hasilnya dalam Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan pada 17 Maret 2013 tersebut PSSI dan KPSI resmi bersatu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Archer, Clive. 2001. *International Organization Third Edition*. London : Routledge
- Pandjaitan, Hinca. 2011. *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*. Jakarta : Gramedia
- Statutes, FIFA. 2005. *Regulations Governing the Application of the Statutes Standing Orders of the Congress*. Zurich
- Willems, Peter. 2011. *Non-Governmental Organizations in World Politics : The Construction of Global Governance*. New York : Routledge
- Garcia, B. 2014. *The Power of FIFA Over National Governments: a New Actor in World Politics?* disajikan Pada: FLACSO-ISA Joint International Conference, Global and Regional Powers in a Changing World, 23rd-25th July 2014, di Selenggarakan Oleh University of Buenos Aires, Argentina.
- Natakusuma, Arief. 2008. Drama Itu Bernama Sepak Bola. Jakarta : Elex Media Komputindo diakses di <https://books.google.co.id/books?id=cf6C6aEcqjwC&pg=PA333&lpg=PA333&dq=drama+itu+bernama+sepakbola+natakusumah+2006&source=bl&ots=ywhuikBJrK&sig=TfDEmwhbGrPmrtDgUHpPc39vaiQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjHoeDiJbRAhWBOo8KHeZ8DTgQ6AEIGzAA#v=onepage&q=drama%20itu%20bernama%20sepakbola%20natakusumah%202006&f=false> tanggal 17 Agustus 2016 pukul 15.00
- Pandjaitan. Hinca IP. 2013. *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Di akses di [https://books.google.co.id/books?id=t\\_l6i6vDfcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=t_l6i6vDfcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false) pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 17.00
- Rafika, Hany. 2011. Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Mengatasi Masalah Kemanusiaan di Aceh Tahun 2004-2006. *Jom FISIP*, Vol. 2, No. 2. <http://biz.kompas.com/read/2011/12/22/22223888/isi.surat.fifa.kepada.pssi>

diakses pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 15.05

<http://grassroots.fifa.com/en/football-officials/establishing-links-with-governments/links-and-relationships.html#c5097> diakses pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 15.05

<http://internasional.kompas.com/read/2011/04/05/15411728/pemerintah-siap-fasilitasi.komite.normalisasi.fifa> diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 08.55

<http://kemenpora.go.id/index/preview/kliping/146> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 21.00

<https://sites.duke.edu/wcwp/tournament-guides/world-cup-2014/fifa-institutional-politics/the-structure-and-policies-of-fifa/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 19.10

<https://www.bola.net/editorial/konflik-dan-kisruh-dualisme-pssi-dan-sanksi-fifa-yang-menanti.html> diakses pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 15.20

<https://www.gatra.com/bola-indonesia/44081-fifa-haramkan-dualisme-asosiasi-sepak-bola.html> diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 23.13

<http://www.goal.com/id-ID/news/1390/timnas-indonesia/2015/04/01/10349412/sejarah-hari-ini-1-april-fifa-tunjuk-komite-normalisasi> diakses pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 21.00

<https://www.jpnn.com/news/dualisme-pssi-berlarut-pemerintah-angkat-tangan> diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 08.57

<http://www.kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/247> diakses pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 19.00

<http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/43/UNDUH> diakses pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 16.10

<http://www.viva.co.id/bola/bola-nasional/374165-menpora-bentuk-task-force-untuk-atasi-kisruh-pssi> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 18.00

<http://www.viva.co.id/bola/read/213028-fifa-komite-normalisasi-ambil-alih-tugas-pssi> diakses pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 18.00

<http://www.viva.co.id/bola/read/232071-agenda-kongres-luar-biasa-pssi> diakses pada tanggal 12 Juli 2017 pukul 18.20